



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURNIKMAH
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 831734

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.456.000.000**

1. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 355 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 2607 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 463 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **128.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



3. MOTOR, HONDA GL 200 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	300.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.059.127.230
F. HARTA LAINNYA	Rp.	60.000.000
Sub Total	Rp.	4.003.127.230

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.003.127.230

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUKHARI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 677558

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	222.800.000
1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	
220.000.000		
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
2.800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	322.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	265.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	810.600.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 810.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Suhaimi
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 903064

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	304.000.000
1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 304.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	107.000.000
1. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
2. MOBIL, HONDA CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	68.081.758
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	479.081.758

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **479.081.758**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : EMIRALDA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 880354

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	850.500.000
1. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 850.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	149.000.000
1. MOBIL, MAZDA 21.5 L HBR A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 149.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	155.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.179.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.179.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAYA SHABARA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 750707

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.045.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 600.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 881 m2/881 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 445.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	148.365.000
1. MOTOR, YAMAHA 5TLMIO/SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOBIL, DAIHATSU E700RG TX MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
3. MOTOR, HONDA H1B02N42LIA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.865.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	38.811.598
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.233.176.598
III. HUTANG	Rp.	379.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	853.576.598

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINUDDIN ABDULLAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 903125

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 616 m2/400 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/138 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
4. Tanah Seluas 1345 m2 di KAB / KOTA PIDIE JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 600.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERTAGIH****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 45.819.392****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 6.545.819.392****III. HUTANG****Rp. 132.450.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 6.413.369.392****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSRIANI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN UMUM
3. NHK : 703206

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/14.8 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	19.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	57.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	606.400.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **606.400.000**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WACHYOE HADI SAPUTRA
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
3. NHK : 672496

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.050.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.050.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	545.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA HARRIER SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	841.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	102.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.475.000.000
Sub Total	Rp.	7.013.500.000
III. HUTANG	Rp.	1.605.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.408.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.